

**TESIS**

**EFEKTIVITAS *E-GOVERNMENT* DALAM SISTEM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA PACONNE KECAMATAN  
BELOPA UTARA KABUPATEN LUWU**

**Juwita Pratiwi Lukman**

**E012191008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**EFEKTIVITAS *E-GOVERNMENT* DALAM SISTEM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA PACONNE KECAMATAN  
BELOPA UTARA KABUPATEN LUWU**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Administrasi Publik

Disusun dan diajukan oleh:

**JUWITA PRATIWI LUKMAN**

**E012191008**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**EFEKTIVITAS E-GOVERNMENT DALAM SISTEM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA PACONNE KECAMATAN  
BELOPA UTARA KABUPATEN LUWU**

Disusun dan diajukan oleh

**Juwita Pratiwi Lukman**  
E012191008

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal **31 MEI 2021**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si.**  
NIP. 196012311986011005



**Dr. Nurdin Nara, M.Si.**  
NIP. 196211071988031002

Ketua Program Studi  
Administrasi Publik,

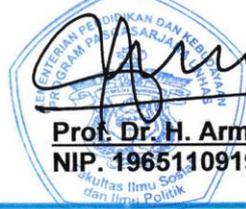
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si.**  
NIP. 196012311986011005



**Prof. Dr. H. Armin, M.Si.**  
NIP. 196511091991031008



### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juwita Pratiwi Lukman

NIM : E012191008

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juni 2021

Yang menyatakan,

  
METERAI  
TEMPEL  
X090EAJX155473738  
Juwita Pratiwi Lukman

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini membutuhkan waktu yang cukup lama dengan berbagai hambatan dan tantangan, namun hal tersebut dapat teratasi dengan usaha yang keras dan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.

Penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada kedua orangtua, Ibu Siti Amina dan Ayah Lukman Yunus beserta saudara-saudara tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan motivasi dan bantuan moril dalam menyelesaikan tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis juga menyadari bahwa tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak yang telah membantu dengan berbagai caranya masing-masing. Secara khusus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

3. **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si** selaku Dekan FISIP Universitas Hasanuddin.
4. **Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si** selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik dan selaku Pembimbing I, yang memiliki peranan besar dalam memberikan arahan, tanggapan, dan koreksi yang sangat bermanfaat, serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku Pembimbing II yang sangat besar peranannya dalam memberikan arahan, tanggapan, dan koreksi yang sangat bermanfaat serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. **Dr. Muhammad Yunus, MA., Dr. Suryadi Lambali, MA dan Dr. Hasniati, S.Sos.,M.Si** selaku tim penguji yang telah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan saran dalam penyusunan tesis ini.
7. **Dosen Pengajar Program Studi Magister Administrasi Publik**, yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan arahan disetiap jam pelajaran berlangsung.
8. **Staf Akademik Pascasarjana FISIP Universitas Hasanuddin**, yang memiliki peranan besar dalam kelengkapan administrasi dari awal studi hingga akhir studi.
9. **Pemerintah Kabupaten Luwu** yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa beserta Perangkat Desa Paconne** yang sangat membantu penulis

dalam memberikan informasi secara lisan dan berupa data sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

**11. Teman-teman Magister Administrasi Publik 2019** yang telah memberikan dukungan dan bantuannya selama proses pembuatan hingga penyelesaian tesis.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala dan imbalan yang setimpal dari Allah SWT, aamiin.

Makassar, Juni 2021  
Penulis,

Juwita Pratiwi Lukman

## ABSTRAK

**JUWITA PRATIWI LUKMAN.** *Efektivitas E-Government dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu* (dibimbing oleh Muh Akmal Ibrahim dan Nurdin Nara).

Penelitian ini bertujuan menganalisis *E-Government* dalam sistem pengelolaan keuangan desa (Siskeudes) di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dengan menggunakan Teori Scott sebagai indikator efektivitas menunjukkan bahwa *e-Government* dalam sistem pengelolaan keuangan desa (Siskeudes) di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari tiga aspek, yaitu pertama, struktur, adanya ketidaksesuaian penempatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Siskeudes; kedua, proses, kesiapan pemerintah desa belum didukung oleh sarana bimbingan teknis dan pelatihan dalam penggunaan sistem keuangan desa; dan ketiga, hasil, terobosan teknologi informasi melalui Siskeudes berpengaruh terhadap kemudahan dan transparansi keuangan.

Kata kunci: efektivitas, e-Government, sistem pengelolaan keuangan desa



## ABSTRACT

**Juwita Pratiwi Lukman.** *The Effectiveness of E-Government in Village Financial Management System (SISKEUDES) in Paconne Village, North Belopa District, Luwu Regency* (supervised by **Muh. Akmal Ibrahim** and **Nurdin Nara**)

The research aims to analyze e-government in village financial management system (SISKEUDES) in Paconne Village, North Belopa District, Luwu Regency.

This study used qualitative approach with descriptive techniques. The data were obtained through interview, observation, and documentation.

The results of the study using Scott's theory as an effectiveness indicator show that e-government in the village financial management system (Siskeudes) in Paconne Village, North Belopa District, Luwu Regency has not run effectively. This is indicated by three aspects, i.e. 1) the structures in which there is a discrepancy in the placement of human resources in the implementation of Siskeudes, 2) processes in which the readiness of the village government has not been supported by technical guidance and training in the use of the village financial system, and 3) outcomes in which the breakthrough of information technology through Siskeudes affects the easiness and transparency of finance.

Keywords: effectiveness, e-government, village financial management system



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penulisan .....	9
1.4 Manfaat Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Perspektif Administrasi Publik .....	12
2.2 Konsep Efektivitas.....	22
2.3 <i>E-Government</i> .....	30
2.4 Sistem Keuangan Desa.....	38
2.5 Penelitian Terdahulu .....	43
2.6 Kerangka Pikir.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	49
3.2 Lokasi Penelitian .....	49
3.3 Fokus Penelitian.....	49
3.4 Teknik Penentuan Informan .....	51
3.5 Informan Penelitian .....	51
3.6 Sumber Data .....	52
3.7 Teknik Pengumpulan Data .....	52
3.8 Teknik Analisis Data.....	53
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>54</b>
4.1 Gambaran Umum Desa Paconne.....	54
4.2 Gambaran Umum Pemerintah Desa Paconne .....	57

4.3 Gambaran <i>E-Government</i> dalam Aplikasi SISKEUDES .....	72
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>93</b>
5.1 Struktur <i>E-government</i> dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Desa ...	93
5.1.1 Sumber Daya Manusia .....	98
5.1.2 Pembagian Tugas dan Kapasitas Bekerja .....	106
5.1.3 Aturan, Mandat dan Regulasi .....	111
5.2 Proses <i>E-government</i> dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Desa .	117
5.2.1 Proses Kelembagaan .....	118
5.2.2 Proses Perilaku .....	121
5.2.3 Proses sebagai Keluaran .....	125
5.3 Hasil <i>E-government</i> dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Desa ....	131
5.3.1 Pemerintah.....	133
5.3.2 Masyarakat .....	139
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>141</b>
6.1 Kesimpulan .....	141
6.2 Saran .....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>152</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Jumlah Anggaran Pendapatan Desa di Desa Paconne .....	8
2.1	Peneitian Terdahulu .....	44
4.1	Perode Kepemimpinan Kepala Desa Paconne .....	54
4.2	Data Sumber Daya Manusia.....	56
4.3	APBDes dan Laporan Realisasi Desa Paconne .....	66
5.1	Jumlah Aparat Desa berdasarkan Latar Belakang Pendidikan dan Jabatan Pada Lingkup Pemerintahan Desa Paconne .....	101
5.2	Materi Bimbingan Teknis Aplikasi SISKEUDES Tahun 2020 .....	105
5.3	Matriks <i>E-Government</i> dalam Struktur Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Paconne .....	116
5.4	Matriks <i>E-Government</i> dalam Proses Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Paconne .....	129
5.5	Perbedaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	132
5.6	Rincian Besaran DD Kec. Belopa Utara Kab. Luwu TA 2020 .....	135
5.7	Matriks <i>E-Government</i> dalam Hasil Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Paconne .....	143

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Kerangka Pikir .....	48
4.1	Peta Desa Paconne .....	55
4.2	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Paconne.....	58
4.3	Aplikasi Sistem Keuangan Desa.....	75
4.4	Menu Parameter Sistem Keuangan Desa.....	75
4.5	Daftar Bidang dan Bidang Kegiatan Aplikasi Siskeudes .....	77
4.6	Referensi Sumber Dana .....	78
4.7	Menu Standar Satuan Harga dan Biaya .....	79
4.8	Menu Perencanaan .....	80
4.9	Menu Penganggaran .....	82
4.10	Menu Penatausahaan .....	86
4.11	Menu Pembukuan .....	89
4.12	Menu Laporan .....	91
5.1	Pengelolaan Keuangan Desa .....	94
5.2	Keputusan Kepala Desa Paconne No. 19 Tahun 2020.....	113
5.3	Ilustrasi Kelembagaan Pada Pengelolaan Keuangan Desa Paconne Tahun 2020.....	114
5.4	Layanan Informasi dalam Siskeudes .....	126
5.5	Model Pelaporan pada SISKEUDES .....	128
5.6	Laporan Realisasi APBDesa Desa Paconne Tahun 2020 .....	142

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat dewasa ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan bisnis. Peranan teknologi informasi dalam berbagai aspek bisnis dapat dipahami sebagai sebuah teknologi yang menitikberatkan pada pengaturan sistem informasi dengan penggunaan komputer yang dapat memenuhi kebutuhan informasi dunia bisnis dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat (Cerullo, 1980).

Penerapan Teknologi Informasi tidak hanya pada lingkup bisnis, tetapi pada lingkup sektor publik khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran teknologi informasi dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya *good governance* secara transparansi, akuntabilitas, responsif, setara dan inklusif, efektif dan efisien, mengikuti aturan hukum, partisipatif, dan berorientasi kepada kesepakatan. Pertumbuhan infrastruktur teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di segala bidang termasuk bidang pelayanan publik dengan melakukan upaya terobosan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi seperti penyediaan jasa akses internet agar desa termasuk dalam Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) yang siap dengan kemampuan internet (desa pintar) guna mengatasi kesenjangan digital yang akan didorong dengan percepatan penyediaan jasa akses internet dari tingkat kecamatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan normatif dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025 dengan tegas dinyatakan bahwa pembangunan pos dan telematika diarahkan untuk

mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (*knowledge-based society*).

Pemanfaatan teknologi informasi meningkat pesat hingga merambah ke desa-desa. Ketergantungan terhadap teknologi informasi begitu besar sehingga sebuah organisasi tidak dapat eksis dan menjalankan fungsinya tanpa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Menurut Akadun, penerapan teknologi informasi dan komunikasi akan membuat kinerja organisasi lebih efektif, efisien, dan kompetitif. Bersama dengan hal tersebut, pemerintahan juga memasuki era baru dalam memberikan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital yang dinamakan *e-government*. *E-government* membawa dampak dan perubahan terhadap struktur dan fungsi administrasi yang terhubung dengan infrastruktur informasi eksternal yang bersifat digital. Penggunaan teknologi informasi sebagai instrumen baru dalam memberikan pelayanan secara efektif dan efisien.

Menurut (Nugroho, 2008) sistem informasi berfungsi untuk pengelolaan informasi terkumpul, terolah, dan tersimpan dengan baik sehingga mudah ditelusuri apabila diperlukan pengelolaan informasi harus memenuhi persyaratan kelengkapan, kemutahiran, keandalan dan kepercayaan. Memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu media dalam memberikan layanan terhadap publik merupakan langkah awal untuk menciptakan efektivitas suatu layanan baru. Efektivitas dari sistem teknologi informasi dilihat dari tiga bagian yaitu model, tujuan dan proses dari sistem informasi tersebut. Efektivitas sebuah sistem dinilai dari sejauh mana sistem tersebut mampu mencapai tujuannya. Keanekaragaman dan volume transaksi yang diolah, atau kepuasan pengguna

adalah ukuran dari efektivitas. Sistem informasi yang efektif menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan bagi pengguna (Laudon, 2015).

Menurut (Sudarto, 2006), teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu solusi memperbaiki birokrasi, untuk mencapai ketata pemerintahan yang baik. Di lingkungan pemerintah TIK dengan sistem *e-government* merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung aktifitas pemerintahan, maupun yang terpenting untuk pemberian pelayanan yang prima dari pemerintah untuk masyarakat yang ditujukan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan berwibawa. Selain itu, *e-government* menjanjikan suatu hasil kerja yang efisien, partisipasi, berkeadilan, demokrasi dan akuntabilitas.

Pemanfaatan *e-government* diharapkan akan menyebabkan terjadinya pergeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna, dimana hasil akhir dari suatu proses pelayanan adalah kepuasan pengguna.

Lahirnya aturan terkait pemerintah daerah yang menjelaskan adanya sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya sistem desentralisasi membawa dampak perubahan besar bagi pertumbuhan nasional Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keberhasilan tiap daerah otonom dalam pertumbuhan ekonomi dan kemandirian membangun daerah masing-masing. Berbagai keberhasilan diraih baik di bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, infrastruktur dan berbagai apresiasi di berbagai bidang lainnya termasuk

penghargaan terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Keberhasilan yang ditunjukkan oleh tiap daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumberdaya yang ada, belum sepenuhnya berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat desa. Desa seringkali tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan jika dibandingkan dengan daerah kota. Berbagai analisis dan gagasan kemudian mendorong pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berbagai regulasi terkait pengelolaan dana desa, membawa harapan baru masyarakat desa.

Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Disamping pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (Aisyah, S. 2018:1). Hal tersebut selaras dengan program pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI". Amanat undang-undang desa mensyaratkan agar desa mengelola keuangannya sendiri berdasarkan asas transparan, partisipatif dan akuntabel.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Kebijakan pemerintah mengucurkan dana desa dengan jumlah yang semakin meningkat mulai dari Rp20 Triliun pada tahun 2015 hingga Rp72 Triliun pada tahun 2020 yang merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di desa. Secara rata-rata, dana desa yang disalurkan ke setiap desa sebesar Rp858 juta yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, hal ini untuk pengetasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Selain dana desa, pemerintah desa juga mengelola alokasi dana desa (ADD), pendapatan asli desa, bagi hasil pajak/retribusi, bantuan keuangan kabupaten/kota, dan bantuan keuangan provinsi. Seluruh sumber pendanaan tersebut dikelola oleh pemerintah desa dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Pada tahapan tersebut, pemerintah harus melibatkan masyarakat desa sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan

masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa, salah satunya adalah keuangan.

Besarnya sumber dana yang dikelola oleh desa menjadi tanggung jawab besar yang harus dilakukan oleh desa, namun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada. Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2017-2019 ada sekitar 277 kasus korupsi di tingkat desa pada pada sektor penganggaran dana desa yang kebanyakan dilakukan oleh kepala desa. Tahun 2015 kasus korupsi berjumlah 15 kasus, meningkat menjadi 61 kasus pada tahun 2016, kemudian sebanyak 66 kasus di tahun 2017, dan 89 kasus di tahun 2018 serta tahun 2019 berjumlah 46 kasus korupsi di desa. (Teguh Firmansyah, 2019: *ICW Ungkap Kasus Korupsi Dana Desa*. <https://nasional.republika.co.id/berita/q13vj1377/icw-ungkap-kasus-korupsi-dana-desa>. diakses tanggal 7 Oktober 2020). Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa secara baik, minimnya pelibatan dan pemahaman warga akan proses pembangunan di desa.

Untuk mendukung berjalannya tata kelola keuangan desa dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, bersih dan transparan berbasis *e-government*, pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDPT) mengembangkan sebuah kebaruan dalam tata kelola keuangan di desa berupa sistem pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi dalam bentuk aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan

melakukan pengembangan tata kelola keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES. Sesuai dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 145/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diluncurkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa dengan menciptakan laporan keuangan yang akuntabel.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dirancang secara terintegrasi dengan menggunakan fitur-fitur sederhana dan *user friendly* sehingga pengguna mudah mengoperasikannya. Aplikasi Siskeudes bertujuan agar pengelolaan keuangan desa terutama yang bersumber dari dana desa harus dapat dikelola secara bersih dan transparan. Tahun 2016 Kabupaten Luwu menjadi salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang menerapkan sistem keuangan desa berbasis aplikasi dari sepuluh provinsi di Indonesia. Penerapan aplikasi Siskeudes pada tahun 2017 mencapai 33,17 persen atau 24.863 dari 74.954 desa di seluruh Indonesia, dan pada tanggal 31 Desember 2019 penerapan aplikasi Siskeudes mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 95,06 persen dari seluruh desa di Indonesia. Aplikasi Siskeudes versi 2.0 telah diimplementasikan pada 71.249 desa di 417 kabupaten/kota dari 74.954 desa di 434 kabupaten/kota.

Desa Paconne adalah salah satu desa yang menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menjadi bagian baru dalam pengelolaan keuangan yang sebelumnya bersifat manual. Dari perspektif kewenangan, Desa Paconne menjadi salah satu desa yang mengelola keuangan desa atau dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Pendapatan Desa di Desa Paconne**

No	Pendapatan Desa	Tahun Anggaran 2020
1	<b>Pendapatan Desa</b>	Rp. 1.038.632.094,-
	<b>a. Pendapatan Asli Desa</b>	Rp. ,-
	<b>b. Pendapatan Transfer</b>	Rp. 1.037.312.392,-
	- Dana Desa	Rp. 732.999.000,-
	- Alokasi Dana Desa	Rp. 288.263.000,-
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 16.050.392,-
	<b>c. Pendapatan Lain-Lain</b>	Rp. 1.319.702,-

*Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paconne Tahun 2020*

Berdasarkan tabel tersebut jumlah dana desa yang dikelola Desa Paconne sangat besar sehingga diperlukan sebuah sistem yang berbasis teknologi informasi yang dapat membantu desa dalam mengelola keuangannya secara efektif. Pengelolaan keuangan dalam aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) akan melahirkan laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa yang disusun oleh pemerintah desa.

Pelaksanaan teknologi informasi bukan merupakan pelaksanaan yang mudah, kendala dapat terjadi pada semua elemen-elemen dan unsur-unsur yang mendukungnya, hal tersebut terjadi pada pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai bagian dari *e-government*. Dari observasi awal penulis menemukan bahwa perkembangan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Paconne belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari segi: 1) *Struktur (structures)*, pemerintah desa masih

belum memahami penggunaan aplikasi Siskeudes, sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan penggunaan sistem berbasis elektronik. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya penggunaannya. Selain itu, kurangnya penekanan pada regulasi yang dikeluarkan oleh desa menjadi salah satu kelemahan dalam pelaksanaan siskeudes ini; 2) *Proses (processes)*, kesiapan pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi ini dinilai rendah yang berpengaruh terhadap hubungan kerja, pengambilan keputusan dan kepatuhan dalam penggunaannya. Juga, pembaharuan aplikasi siskeudes hanya dilakukan sekali dalam setahun; 3) *Hasil (outcomes)*, dari observasi awal penulis menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan yang dilaksanakan terhadap perangkat desa terkait yang hanya dilakukan pada awal peluncuran aplikasi siskeudes. Selain itu, kurangnya transparansi ke masyarakat atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa ketidakselarasan konsep dengan realitas dalam pelaksanaan sistem keuangan desa sebagai kebaruan dalam tata kelola keuangan desa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Paconne belum secara efektif terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan indikasi permasalahan yang muncul menjadi daya tarik penulis untuk melakukan kajian secara mendalam dengan topik **“Efektivitas *E-Government* dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan di atas, penulis berusaha merumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Masalah-masalah

yang telah dijabarkan akan disesuaikan dengan teori efektivitas menurut Scott, sebagai berikut:

1. Bagaimana Struktur (*Structures*) *E-Government* dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana Proses (*Processes*) *E-Government* dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu?
3. Bagaimana Hasil (*Outcomes*) *E-Government* dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis struktur (*structures*) *e-government* dalam sistem pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis proses (*processes*) *e-government* dalam sistem pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hasil (*outcomes*) *e-government* dalam sistem pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan sebagaimana dirumuskan di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan serta sumbangsih pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan terkait efektivitas dan pengelolaan keuangan desa berbasis *e-government*.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan kepada pihak pemerintah, terkhusus Pemerintah Desa Paconne terkait pengelolaan keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi berupa materi dalam pembuatan, pengembangan, dan pemanfaatan terkait aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perspektif Administrasi Publik**

Di dalam literatur administrasi publik tidak dapat ditemui pengertian tunggal mengenai administrasi publik, namun terdapat banyak variasi persepsi yang dikemukakan oleh para ahli administrasi publik, salah satunya Dwight Waldo (1996:17) dalam (Maksudi, 2017) mengajukan dua definisi tentang administrasi negara sebagai pedoman pembahasan selanjutnya yaitu:

1. *Public Administration* adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.
2. *Public Administration* adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan urusan negara.

Pengertian diatas dapat dipahami bahwa pertama administrasi publik merupakan proses dimana sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya seperti modal sarana dan prasarana adalah teknologi diorganisir dikelola fungsi manajemen guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, administrasi publik sebagai suatu seni yang merupakan keterampilan dalam praktik yang ditunjukkan untuk mengatur hubungan-hubungan dan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Namun, secara umum administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik.

Menurut Demock dan Demock (1986) dalam (Maksudi, 2017), administrasi publik adalah mempersoalkan masalah “apa” dan masalah “bagaimana” dalam lingkungan pemerintahan masalah-masalah “apa” merupakan persoalan subjek pengetahuan mengenai suatu lapangan yang memungkinkan seseorang

administrator menjalankan tugas-tugasnya masalah-masalah “bagaimana” adalah berhubungan dengan teknik daripada manajemen, yakni prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk melaksanakan rencana-rencana kooperatif hingga berhasil.

Menurut Nicholas Henry dalam (Maksudi, 2017) mengemukakan administrasi publik merupakan kombinasi yang sangat beragam serta tidak berpola antara teori dan pelaksanaannya untuk lebih memahami hubungan antara pemerintah dengan masyarakat serta meningkatkan kebijakan negara terhadap berbagai kebutuhan sosial dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa lebih efektif dan efisien. Leonard D. White dalam Demock dan Demock (1986: 22) dalam (Maksudi, 2017) berpendapat bahwa Administrasi Publik terdiri dari semua tindakan yang ditujukan kepada pelaksana atau pemaksaan kebijakan negara.

Memperhatikan beberapa pengertian administrasi publik yang dikemukakan oleh para ahli seperti diatas dapat disimpulkan bahwa pertama aspek rumusan definisi masih luas dan belum dapat disusun secara singkat sehingga agak sulit untuk menangkap makna secara jelas mengenai administrasi publik itu kedua setiap definisi administrasi publik yang dikemukakan oleh para ahli tersebut masing-masing menggunakan pendekatan berbeda maka secara substansi melahirkan pemaknaan berbeda pula sehingga pengertian republik menjadi istilah yang masih panjang masih simpang siur. Namun, dapat disimpulkan secara menyeluruh tanpa menghilangkan substansi dan unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya, yaitu administrasi publik adalah suatu keseluruhan proses kerja sama secara rasional yang dilakukan aparatur Negara/pemerintah di mana sumber daya dan personel publik di organisir dan

dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal tujuan Negara dan penyelenggaraan berbagai kebutuhan publik.

Administrasi publik dilihat dari perspektif paradigma telah mengalami perkembangan yang cukup cepat mulai dari klasik hingga kontemporer. Menurut Kuhn dalam (Maksudi, 2017) paradigma sebagai kerangka asumsi dasar termasuk standar untuk menentukan validitas pengetahuan, aturan dari bukti dan kesimpulan, dan prinsip-prinsip dasar menyebabkan dan efek bersama oleh kelompok ilmiah.

Sementara itu, menurut Gibson Burrell dan Gareth Morgan dalam (Thoha, 2014) paradigma adalah meningkatkan kesamaan perspektif yang mengikat kerja kelompok teori bersama, ialah belajar dengan cara yang mereka anggap dapat berguna sebagai pendekatan teori sosial dalam batas-batas dari permasalahan yang sama.

Secara sederhana paradigma dapat diartikan sebagai suatu kerangka pijakan teori atau teori dasar, dan berisikan teori pokok, konsep, metodologi/cara pendekatan yang dapat dipergunakan para praktisi dalam menanggapi sesuatu permasalahan, baik dalam kaitan pengembangan ilmu maupun upaya pemecahan permasalahan bagi kemajuan hidup dan kehidupan kemanusiaan.

### **2.1.1 Paradigma *Old Public Administration* (OPA)**

Paradigma administrasi publik model klasik juga dapat dilihat melalui model "*old chesnuts*" dari Peters (1996 dan 2001), dimana Administrasi Publik berdasarkan pada Pegawai Negeri yang politis dan terinstitusionalisasi; organisasi yang hirarkis dan berdasarkan peraturan; penugasan yang permanen dan stabil; banyaknya pengaturan internal; serta menghasilkan keluaran yang seragam (lihat dalam Oluwu, 2002 dan Frederickson, 2004).

Kelebihan dari administrasi publik klasik adalah politik yang tidak mencampuri kegiatan administrasi di pemerintahan. Sehingga tidak ada hasil dari kegiatan administrasi terhadap publik yang berbau politik. Administrasi publik klasik juga memungkinkan birokrasi memiliki daya stabilitas yang sangat tinggi, karena para birokrat diputuskan berdasarkan pertimbangan obyektif, para birokrat dilindungi dari kesewenangan hukum, dan masa depan para birokrat terjamin. Struktur birokrasi yang kompleks dan formal serta berdasarkan dokumen resmi akan menghindarkan birokrasi dari penyalahgunaan wewenang baik oleh birokrasi karier maupun birokrasi politisi yang berkuasa untuk sementara. Administrasi publik klasik ini juga dapat diimplementasikan di negara berbentuk kerajaan. Selanjutnya, sifat netral dari administrasi publik klasik ini dapat menghindarkan birokrasi dari kepentingan figur atau kelompok-kelompok.

Dalam hal ini karakter *Old Public Administration* dicirikan oleh kegiatan pemerintah yang terfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh administrator publik yang akuntabel dan bertanggungjawab secara demokratis kepada *elected official*. Nilai dasar utama yang diperjuangkan dalam *Old Public Administration* adalah efisiensi dan rasionalitas sebagai sebuah sistem tertutup. Fungsi administrator publik didefinisikan sebagai *planning, organizing, staffing, directing, coordinating* dan *budgeting*.

Nicholas Henry dalam (Maksudi, 2017) melihat perkembangan administrasi publik sebagai pergantian paradigma dalam lima tahap yaitu:

1. Dikotomi politik dan administrasi tahun 1900-1996
2. Prinsip-prinsip administrasi 1920-1930
3. Administrasi sebagai ilmu politik 1950-1970
4. Administrasi publik sebagai ilmu administrasi 1956-1970

## 5. Administrasi Publik sebagai administrasi negara 1970-present

### 2.1.2 Paradigma *New Public Management* (NPM)

Paradigma selanjutnya adalah paradigma *The New Public Management*. Secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. NPM adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti *controlling*, *benchmarking* dan *learn management*. Bagi yang lain, NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. *New public management* (NPM) merupakan sistem manajemen administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan di hampir seluruh negara industri. Sistem ini dikembangkan di wilayah anglo Amerika sejak paruh kedua tahun 80-an dan telah mencapai status sangat tinggi khususnya di Selandia Baru. Perusahaan-perusahaan umum diprivatisasi, pasar tenaga kerja umum dan swasta dideregulasi, dan dilakukan pemisahan yang jelas antara penetapan strategis wewenang negara oleh lembaga-lembaga politik (APA yang dilakukan negara) dan pelaksanaan operasional wewenang oleh administrasi (pemerintah) dan oleh badan penanggungjawab yang independen atau swasta. Administrasi publik mulai mengenalkan *new public management* (NPM) yang merupakan paradigma baru pada tahun 1990-an. Istilah NPM pertama kali dikemukakan Crishtopher Hood dalam artikelnya “*All Public Management of All Seasons*”. Nama *new public management* sering disebut dengan nama lain misalnya *post-bureucratis paradigm* (Barzeley, 1992), dan *reinventing government* (Osborne dan Gaebler, 1992).

*New publik management* (NPM) adalah paradigma baru dalam manajemen sektor publik. NPM biasanya dikawankan dengan *old publik management* (OPM). Konsep NPM muncul pada tahun 1980-an dan digunakan untuk melukiskan sektor publik di Inggris dan Selandia Baru. NPM menekankan ada kontrol atas *output* kebijakan pemerintah, desentralisasi otoritas manajemen, pengenalan pada dasar kuasi-mekanisme pasar, serta layanan yang berorientasi customer. Asal NPM berasal dari pendekatan atas manajemen publik dan birokrasi. Selama ini birokrasi erat dikaitkan dengan manajemen sektor publik itu sendiri. Birokrasi dianggap erat berkaitan dengan keengganan maju, kompleksitas hirarki jabatan dan tugas, serta mekanisme pembuatan keputusan yang *top-down*. Fokus dari NPM sebagai sebuah gerakan adalah pengadopsian keunggulan teknik manajemen perusahaan sektor publik untuk diimplementasikan dalam sektor publik dan pengadministrasiannya.

Paradigma NPM memiliki konsep yang terkait dengan manajemen kinerja sektor publik, yang mana pengukuran kinerja merupakan salah satu dari prinsip-prinsipnya. NPM mengacu kepada sekelompok ide dan praktik kontemporer untuk menggunakan pendekatan-pendekatan dalam sektor privat (bisnis) pada organisasi sektor publik. Pemerintahan yang kaku dan sentralistik sebagaimana yang dianut oleh OPA harus diganti dengan pemerintahan yang berjiwa wirausaha. NPM menganjurkan pelepasan fungsi-fungsi pemerintah kepada sektor swasta. Inti dari ajaran NPM dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemerintah diajak untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional dan menggantikannya dengan perhatian terhadap kinerja atau hasil kerja.

2. Pemerintah sebaiknya melepaskan diri dari birokrasi klasik dan membuat situasi dan kondisi organisasi, pegawai dan para pekerja lebih fleksibel.
3. Menetapkan tujuan dan target organisasi dan personel lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil melalui indikator yang jelas.
4. Staf senior lebih berkomitmen secara politis dengan pemerintah sehari-hari daripada netral.
5. Fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar, kontrak kerja keluar, yang berarti pemberian pelayanan tidak selamanya melalui birokrasi, melainkan bisa diberikan oleh sektor swasta.
6. Fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi.

### **2.1.3 Paradigma *New Public Service* (NPS)**

Pada paradigma yang ketiga disebut dengan paradigma *The New Public Service* oleh Denhart & Denhart dalam bukunya yang berjudul "*The New Public Service, Serving not Steering*" yang diterbitkan penerbit ME Sharpe, Inc. New York pada tahun 2003. Paradigma ini secara umum alur pikirnya menentang paradigma-paradigma sebelumnya yaitu paradigma *the old public administration* dan paradigma *the new public management*. Akar dari paradigma ini dapat ditelusuri dari berbagai ide tentang demokrasi. Paradigma *the new public service* berakar dari beberapa teori meliputi:

1. Teori tentang demokrasi kewarganegaraan; perlunya pelibatan warganegara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik.
2. Model komunitas dan masyarakat sipil; akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun *social trust*, kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis.

3. Teori organisasi humanis dan administrasi negara baru; administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan (*human beings*) dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan isu-isu sosial lainnya.

#### **2.1.4 Paradigma Good Governance**

*Good governance* adalah menunjuk pada suatu nilai moral-legal penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga sinergitas interaksi konstruktif diantara institusi negara/pemerintah (*state*) sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat (*society*), (Maksudi, 2019).

*Good governance* menurut *United Nations Development Program* (UNDP) dalam *good governance* didefinisikan sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage nation’s affair at all level’s*” Sementara Bank Dunia (*World Bank*), mendefinisikan *good governance* sebagai cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat.

Konsep *good governance* memiliki tiga pilar yaitu *state* (negara atau pemerintahan) yang berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) yang berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan, ia juga mempunyai pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu sendiri dan *society* (masyarakat madani) yang berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-

kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik, (Maksudi, 2017).

Memahami konsep *good governance* dengan baik, maka kuncinya adalah mempelajari prinsip-prinsip yang melekat didalamnya, dengan memahami prinsip-prinsip *good governance* tersebut, sehingga kita dapat mengukur kinerja suatu pemerintahan, apakah kinerjanya dalam kondisi baik (*good*) atau buruk (*bad*). Oleh karena itu, baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Dalam hal ini, UNDP mengajukan 9 (Sembilan) prinsip yang menjadi karakteristik *good governance* yang saling memperkuat sehingga tidak dapat berdiri sendiri, sebagai berikut: (Maksudi, 2017).

1. Partisipasi (*Participation*), partisipasi adalah suatu proses dimana pembuatan kebijakan, isu-isu prioritas, aksesibilitas untuk barang publik dan jasa juga mengalokasikan sumber daya pengaruhi oleh pemangku kepentingan. sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui institusi intermediasi.
2. Penegakan Hukum (*Rule of law*), hukum peraturan, dan kode etik harus adil dan di berlakukan tanpa memihak, terutama undang-undang hak asi manusia, salah satu cara efektif mengatasi pemerintah yang lemah adalah dengan melihat pemutusan antar Lembaga dalam lingkungan pemerintahan yang lebih luas termasuk ruang lingkup operasi dari masyarakat. Proses mewujudkan *good governance* harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-

karakter antara lain yaitu Supremasi Hukum (*the supremacy of law*), Kepastian Hukum (*legal certainty*), Hukum yang Responsif, penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, dan independensi peradilan.

3. *Transparansi (Transparency)*, transparansi dibangun atas arus informasi yang bebas, proses Lembaga dan informasi secara langsung dapat diakses oleh mereka yang peduli dan informasi yang cukup disediakan untuk memahami serta memantau mereka. keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. *Daya Tanggap (Responsiveness)*, sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen yang terlibat dalam proses penyelenggaraan *good governance* harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan atau keluhan *Stakeholders*.
5. *Berorientasi pada konsensus (Consensus orientation)*, pada *good governance*, pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan konsensus yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama. Konsensus bagi bangsa Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena nilai dasar dalam memecahkan persoalan bangsa adalah melalui musyawarah untuk mufakat.
6. *Keadilan (Equity)*, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan, akan tetapi karena kemampuan

masing-masing warga negara berbeda-beda, sektor publik harus memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan.

7. Efisiensi dan Efektifitas (*Efficiency and Effectiveness*), negara untuk mampu berkompetisi secara sehat dalam pencaturan dunia, kegiatan ketiga pilar *good governance* harus mengutamakan efektifitas dan efesiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektifitas dan efesiensi terutama ditujukan pada sektor publik karena sektor ini menjalankan aktifitasnya secara monopolistik dan tanpa kompetisi.
8. *Akuntabilitas (Accountability)*, setiap aktifitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik, tidak hanya kepada atasan saja, tetapi juga pada *stakeholders* dan yaitu masyarakat luas.
9. Visi Strategis (*Strategic vision*), era yang berubah secara dinamis membuat setiap pilar *good governance* harus memiliki visi yang strategis. Tanpa visi semacam itu, suatu bangsa dan negara akan mengalami ketertinggalan. Visi strategis dapat dibedakan antara visi jangka panjang (*long term vision*) antar 20 sampai 25 tahun, serta visi jangka pendek (*short term vision*) sekitar 5 tahun.

## **2.2 Konsep Efektivitas**

### **2.2.1 Definisi Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin

efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Efektivitas terjadi pada suatu efek atau akibat yang dihendaki dalam suatu perbuatan dan untuk setiap program yang efisien (The Liang gie, 1997). Dimana dalam hal ini dapat dilihat dari hasil, tujuan, atau akibat yang dikehendaki dengan kegiatan program tersebut telah tercapai bahkan secara maksimal. Hal yang sama diungkap oleh (Starawaji, 2009) yang mengemukakan bahwa efektivitas menunjukkan taraf terjadinya tujuan. Jadi suatu efektivitas adalah pengaruh yang disebabkan adanya suatu aktifitas tertentu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang lakukan.

Menurut Effendy (2003) dalam (Khadafi & Mutiarin, 2017), efektivitas adalah proses komunikasi untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan biaya yang sudah dianggarkan, waktu dan juga personil yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut (Zainudin, 2014) bahwa efektivitas dapat didefinisikan menjadi 4 hal sebagai berikut: (1) Mengerjakan sesuatu dengan benar yang sesuai dengan peraturan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya; (2) Mampu mencapai tingkat di atas pesaing, yang dimana dapat menjadi yang terbaik diantara yang terbaik; (3) Menghasilkan sesuatu yang bermanfaat

berdasarkan sesuatu yang telah dikerjakan; dan (4) Mampu menghadapi tantangan di masa depan.

Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Sehingga untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program maka diperlukan ukuran-ukuran efektivitas. Menurut Campbell J.P. (1989:121) dalam (Starawaji, 2009) bahwa terdapat cara pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan program

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat di tinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan dilapangan.

2. Keberhasilan sasaran

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output*, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat *output* dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Kepuasan terhadap program

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kuliatas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka

kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga

#### 4. Tingkat input dan output

Pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari *output* maka dapat dikatakan tidak efisien.

#### 5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan berdasarkan dengan kemampuan operasionalnya dalam melaksanakan program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Campbell, 1989:47).

### **2.2.2 Pendekatan Efektivitas Organisasi**

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas tersebut efektif. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam efektivitas, sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Sasaran

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang ingin dicapai. Dalam

pendekatan ini menggunakan pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Selain tercapainya tujuan dan sasaran, faktor waktu pelaksanaan juga selalu digunakan dalam pengukuran efektivitas. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu mengandung unsur waktu pelaksanaan. Tujuan tercapai dengan waktu yang tepat maka program tersebut efektif (Starawaji, 2009).

## 2. Pendekatan Sumber

Pendekatan ini berdasarkan pada keberhasilan suatu lembaga dalam memperoleh berbagai macam sumber yang dibutuhkannya dan juga memelihara keadaan serta sistem, hal ini dilakukan agar dapat berjalan efektif. Pendekatan ini berdasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya dimana dari lingkungan dapat diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga diberikan pada lingkungannya.

## 3. Pendekatan Proses

Pendekatan ini digunakan sebagai efisiensi dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada dapat berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan pada sumber-sumber yang dimiliki lembaga yang menggambarkan tingkat efisiensi lembaga.

Menurut Budiani (2007:53) dalam (Khadafi & Mutiarin, 2014) bahwa efektivitas suatu program dapat diukur dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana tingkat keberhasilan suatu program berdasarkan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program, yaitu bagaimana kemampuan untuk melaksanakan dan memberikan sosialisasi program dan informasi program, agar dapat terlaksananya program yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Tujuan program, yaitu untuk mengukur sejauh mana tingkat kesesuaian program dengan sasaran dari program yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Pemantauan program, yaitu berupa evaluasi dari program yang telah dijalankan sebelumnya.

### **2.2.3 Kriteria Efektivitas Organisasi**

Gibson (1985:27-30) berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi: *pertama*, kriteria efektivitas jangka pendek yang terdiri dari produksi, efisiensi, dan kepuasan. *Kedua*, kriteria efektivitas jangka menengah yang terdiri dari persaingan dan pengembangan. *Ketiga*, kriteria efektivitas jangka panjang yaitu kelangsungan hidup. Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktivitas, kemampuan ber laba, dan kesejahteraan pegawai. Sementara dalam konteks perkantoran efektivitas dapat diukur dengan kriteria berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;

3. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja;
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien;
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

#### **2.2.4 Indikator Efektivitas Organisasi**

Senada dengan pendekatan di atas, menurut Richard Scott (2001) dalam menentukan indikator efektivitas organisasi harus mengidentifikasi kriteria yang akan digunakan untuk mengkonseptualisasikan kinerja organisasi. Terdapat tiga jenis indikator umum efektivitas yang dapat diidentifikasi yaitu struktur, proses dan hasil (Donabedian 1966; Suchman 1967; Scott 1977, 2001, Hall 1999).

##### **1. Struktur (*Structures*)**

Indikator struktur berfokus pada aktor dan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. indikator ini berdasarkan pada segi keorganisasian atau karakteristik aktor yang terduga yang memberikan dampak efektivitas dalam organisasi. Indikator ini membantu mengidentifikasi komponen kapasitas dalam menemukan keefektifan organisasi dengan menyoroti bagaimana struktur dapat mendukung organisasi. Struktur dapat dipahami sebagai pendukung dan penghambat keefektifan organisasi.

##### **2. Proses (*Processes*)**

Indikator proses mengukur kuantitas dan kualitas pelayanan, artinya proses menilai usaha dari pada efek. Indikator proses menjadi bagian

penting dalam efektivitas organisasi bagaimana melihat sejauh mana sebuah sistem bergerak dalam mendukung sebuah layanan.

### 3. Hasil (*Outcomes*)

Indikator hasil berfokus pada spesifik karakter dari objek yang dijalankan oleh organisasi seperti pelayanan dan peraturan. Selain itu, hasil menunjukkan bagaimana manfaat dari organisasi dalam menciptakan efektivitas pada sebuah organisasi.

Dari uraian di atas, maka indikator efektivitas suatu tujuan dimana standar terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkatan sejauhmana sebuah organisasi, program, kegiatan melaksanakan fungsi-fungsi secara optimal.

#### **2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### 1. Karakteristik Organisasi

Hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

##### 2. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik ini mencakup dua aspek. Pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan

dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

### 3. Karakteristik pekerja

Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

### 4. Karakteristik manajemen

Merupakan strategi dan mekanisme kerja yang di rancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktik manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. dalam melaksanakan kebijakan dan praktik manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

## **2.3 E-Government**

*E-government (Electronic Government)* yaitu sistem informasi yang menggunakan internet dan teknologi digital lain untuk melakukan transaksi,

layanan publik, komunikasi, koordinasi dan manajemen organisasi pemerintah. Pengembangan *e-government* dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas manajemen pemerintahan dengan menggunakan internet dan teknologi digital lainnya. Menurut Richardus (2002:7) bahwa konsep *e-government* berkembang karena adanya pemicu utama, yaitu:

- 1) Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, *civil society*, *good corporate governance*, perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global.
- 2) Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebar ke seluruh lapisan masyarakat berbagai belahan dunia dalam hitungan detik.
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya.

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *e-government* sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat, bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju pemerintahan yang baik. Tujuan utama e-

*government* adalah untuk memberikan kepuasan yang terbaik kepada pengguna jasa atau untuk memberikan kepuasan maksimal.

*E-government* diperuntukkan ke dalam: (a) Pemerintah yang menggunakan teknologi, khususnya aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan akses dan *delivery* layanan pemerintah kepada masyarakat, rekan bisnis, pegawai dan pemerintah lainnya; (b) *E-government* sebagai suatu proses reformasi di dalam cara pemerintah bekerja, berbagai informasi dan memberikan layanan kepada internal dan eksternal klien bagi keuntungan baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku bisnis; (c) Pemanfaatan teknologi informasi seperti *wide area network* (WAN), internet, *world wide web*, komputer oleh instansi pemerintah untuk menjangkau masyarakat, bisnis dan cabang-cabang pemerintah lainnya; dan (d) Memperbaiki layanan kepada masyarakat, memperbaiki layanan kepada dunia bisnis dan industri, memberdayakan masyarakat melalui akses kepada pengetahuan dan informasi, dan membuat pemerintah bekerja secara lebih efisien dan efektif.

Dasar kebijakan *e-government* di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *E-Government* disebutkan bahwa pengembangan *e-government* harus dilaksanakan secara harmonis dengan mengoptimalkan hubungan antara inisiatif masing-masing instansi dan penguatan kerangka kebijakan untuk menjamin keterpaduannya dalam suatu jaringan sistem manajemen dan proses kerja. Tujuan strategis *e-government* yang perlu dilaksanakan berdasarkan aturan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas;

- 2) Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah daerah secara holistik;
- 3) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
- 4) Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
- 5) Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintahan maupun pemerintah daerah disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat
- 6) Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

Pelaksanaan *e-government* di Indonesia sesuai dengan Nawa Cita yang berkaitan erat dengan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Konteks pemerintahan saat ini, penyelenggaraan *e-government* atau pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Dalam hal ini roadmap *e-government* yang dirancang pemerintah mengacu pada trisakti yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Pada esensinya *e-government* merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology (ICT)*) dalam administrasi publik yang dibangun sebagai upaya untuk merevitalisasi organisasi dan manajemen pemerintahan. Hal ini di maksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima berdasarkan pada tipe relasi *e-government*.

### **2.3.1 Tipe Relasi *E-Government***

Di dalam konsep *e-government* dikenal dengan empat jenis klasifikasi, yaitu: G-to-C, G-to-B, G-to-G, dan G-to-E.

#### **1) *Government to Citizens* (Pemerintah ke Masyarakat)**

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum, yaitu di mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai aplikasi teknologi informasi untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Tujuan utama aplikasi *e-government* bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintah untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

#### **2) *Government to Business* (Pemerintah ke Pelaku Usaha)**

Tipe G-to-B ini merupakan tipe yang mendekatkan antara pemerintah dengan pelaku usaha. Hal tersebut bertujuan untuk membangun relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis dengan tujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan usahanya, dan lebih jauh lagi G-to-B ini dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

#### **3) *Government to Government* (Pemerintah ke Pemerintah)**

Kebutuhan untuk berinteraksi dan berkomunikasi antar satu pemerintah dengan pemerintah (G-to-G) setiap harinya untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan sebagainya.

#### **4) *Government to Employees (Pemerintah ke Pegawai/Aparat)***

Aplikasi *e-government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Sebagai contoh format G-to-E yaitu adanya sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.

#### **2.3.2 Manfaat *E-Government***

Penerapan *e-government* memiliki banyak manfaat dalam menunjang efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Menurut Al Gore dan Tony Blair dalam (Richardus, 2002) telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-government* bagi suatu negara, antara lain:

##### **1) Mengurangi biaya**

Memberikan pelayanan secara *online* atau dalam jaringan secara signifikan dapat mengurangi total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya dibandingkan pelayanan secara manual.

##### **2) Mendukung perkembangan ekonomi**

Teknologi dapat memudahkan pemerintahan dalam menciptakan iklim bisnis dengan menyederhanakan tahapan administrasi atau mengurangi birokrasi. Dengan mendukung perkembangan ekonomi terdapat dampak langsung terhadap ekonomi seperti *e-procurement* atau proses lelang

secara elektronik dengan menciptakan kompetisi yang lebih luas dan lebih banyak peserta.

3) Memperkuat transparansi dan akuntabilitas

Penerapan *e-government* dapat meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*. Melalui *e-government* peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan dengan penyediaan informasi serta pelacakan dalam jaringan (*online tracking*) dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

4) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat

*E-government* memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berupa informasi dari pemerintah yang dapat diperoleh tanpa harus datang ke kantor-kantor pemerintahan. Informasi tersebut tersedia dalam 24 jam dan tujuh hari dalam seminggu tanpa harus bergantung pada jam operasional kantor pemerintahan.

5) Memberdayakan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh yang memungkinkan masyarakat dan pihak-pihak yang terikat sebagai mitra pemerintah terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik secara demokratis dan merata.

Dengan teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam pemerintahan (*e-government*) membuat masyarakat mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

### 2.3.3 Tahapan dalam Membangun *E-Government*

Menurut Nugroho tahapan perkembangan implementasi e-government di Indonesia dibagi menjadi empat. Tahapan perkembangannya e-government sebagai berikut:

- a) *Web Presence* yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah.
- b) *Interaction*, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi Email dalam website pemerintah.
- c) *Transaction*, yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah.
- d) *Transformation*, yaitu pelayanan dari pemerintah meningkat secara terintegrasi.

Kaitan konsep dan teori dalam tinjauan pustaka pada tesis ini adalah pada konteks pengaplikasian *E-Government* dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Paconne. Hal tersebut memperkaya pemahaman penulis dan dapat menjadi bahan rujukan dalam pengaplikasiannya di lapangan melalui penelitian penulis. Tesis ini melihat sejauh mana keefektifan *E-Government* melalui aplikasi Siskeudes yang bertujuan mengelola keuangan secara digital melalui teknologi informasi yang diharapkan dapat menciptakan interaksi dengan pemerintah desa sebagai pengguna.

## **2.4 Sistem Keuangan Desa**

Sistem keuangan desa merupakan sebuah aplikasi pengelolaan keuangan yang diperuntukkan bagi desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi SISKEUDES dirilis dengan format V1.0.R1.06.

Prosedur penggunaan Aplikasi Sistem keuangan desa (SISKEUDES) oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari pemerintah daerah untuk penggunaan aplikasi siskeudes kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan aplikasi siskeudes dikoordinasikan oleh pemerintah daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi ini ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

#### 1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa).

#### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh bupati/walikota.

#### 3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan.

#### 4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksana APB Desa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat.

#### 5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran sesuai dengan peraturan desa. Selain itu, pemerintah desa berkewajiban menginformasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai transparansi keuangan.

### **2.4.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan,

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

#### **2.4.2 Struktur Pengelolaan Keuangan Desa**

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) adalah kepala desa yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini, kepala desa berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

#### **a. Kepala Desa**

Adapun kewenangan yang dimiliki kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yaitu:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa;
- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa;
- Menetapkan pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD);
- Menyetujui dokumen pelaksana anggaran (DPA), dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA), dan dokumen pelaksana anggaran lanjutan (DPAL);
- Menyetujui rencana anggaran kas (RAK) desa; dan
- Menyetujui surat permintaan pembayaran (SPP).

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) terdiri atas: sekretaris desa; kaur dan kasi; dan kaur keuangan.

#### **b. Sekretaris Desa**

Sekretaris desa bertindak selaku koordinator PPKD dengan tugas:

- Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB desa;
- Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB desa dan rancangan perubahan APB desa;

- Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB desa, perubahan APB desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa;
- Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa dan perubahan penjabaran APB desa;
- Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa;
- Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- Melakukan verifikasi terhadap RAK desa; dan
- Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa.

**c. Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi)**

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Pada pasal 6 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, disebutkan bahwa kaur terdiri atas kaur tata usaha dan umum; dan kaur perencanaan. Sedangkan kasi terdiri atas kasi pemerintahan; kasi kesejahteraan; dan kasi pelayanan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kaur dan kasi mempunyai tugas:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

- Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP desa.

#### **d. Kaur Keuangan**

Melaksanakan fungsi kebendaharaan, yang mempunyai tugas:

- Menyusun RAK desa; dan
- Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB desa.

### **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan sejumlah penelitian yang pernah dilaksanakan oleh orang atau pihak lain. Hal-hal yang ditekankan pada penelitian terdahulu, meliputi: konsep yang digunakan, pendekatan dan metode penelitian, hasil penelitian dan relevansinya dengan penelitian yang akan digunakan. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian ini, antara lain:

**Tabel 2.1**  
**Peneitian Terdahulu**

<b>1.</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan <i>Cloud</i> Pada Pemerintah Kabupaten Jember</b>
	Peneliti	Diana Sugiyantari (2018)
	Tujuan Penelitian	Menganalisis efektivitas implementasi SIMDA keuangan sebelum dan sesudah berbasis <i>cloud</i> di Kabupaten Jember.
	Hasil Penelitian	Aplikasi SIMDA <i>Cloud</i> membuat pengelolaan keuangan lebih praktis, efektif, dan efisien. Perubahan dari sistem lama ke sistem baru perlu dianalisis untuk mengetahui efektivitas implementasinya karena perubahan tersebut diharapkan dapat berpengaruh pada peningkatan kinerja, informasi, aspek ekonomi, aspek keamanan, aspek efisiensi, dan aspek pelayanan atau sering disebut sebagai variabel PIECES ( <i>Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, and Services</i> ).
	Persamaan	Sama-sama meneliti terkait efektivitas sistem keuangan berbasis teknologi informasi
	Perbedaan	Indikator dalam menentukan efektivitas
<b>2.</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Analisis Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Gianyar</b>
	Peneliti	Nyoman Agus Putrawan, I.G.A. Made Asri Dwija Putri, dan Dodik Ariyanto (2017)
	Tujuan Penelitian	Menguji pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dukungan manajemen puncak terhadap kegunaan dengan kepuasan pengguna.
	Hasil Penelitian	Kualitas informasi dan dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kegunaan, namun kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap kegunaan. Kualitas sistem, kualitas informasi, kegunaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna namun dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna.
	Persamaan	Sama-sama meneliti terkait efektivitas sistem
	Perbedaan	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah model Seddon dan Kiew yang dihubungkan dengan teori <i>theory of reasoned action</i> (TRA) dan <i>social cognitive theory</i> (SCT).
<b>3.</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Efektivitas Pelayanan Administrasi Pertanahan menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen</b>

		<b>Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan kota Pekanbaru</b>
	Peneliti	Laila Pitriani (2018)
	Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui efektivitas pelayanan dalam administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui hambatan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan menggunakan sistem informasi manajemen pertanahan nasional.
	Hasil Penelitian	Pelayanan di kantor Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru menggunakan sistem aplikasi pelayanan sudah berjalan efektif dalam hal pengurusan administrasi pertanahan yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan aplikasi SIMTANAS ini yaitu kurangnya anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan sistem jaringan komputer ini dan juga kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan.
	Persamaan	Metode penelitian
	Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator dalam efektivitas pelayanan</li> <li>• Objek penelitian</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) studi kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo</b>
	Peneliti	Sulistyowati, Norita Citra, dan Elok Fitriyah (2019)
	Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
	Hasil Penelitian	Menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan desa sudah cukup baik dalam pengelola keuangan desa mencakup, kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh sekretaris desa, kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh bendahara desa, kegiatan penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa, kegiatan pelaporan serta kegiatan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Besuki telah melakukan tugas dengan cukup baik. Hanya saja kegiatan pertanggungjawaban terjadi ketidaksesuaian atau ketidakterbukaan dalam menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada masyarakat Desa Besuki.

	Persamaan	Objek penelitian yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
	Perbedaan	Variabel penelitian yang digunakan, penulis menggunakan variabel dari efektivitas.
<b>5.</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa di Bali</b>
	Peneliti	Gayatri dan Made Yenni Latrini (2018)
	Tujuan Penelitian	Mengetahui efektivitas penerapan siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan dana desa.
	Hasil Penelitian	Penerapan aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung efektif terhadap kualitas laporan keuangan dana desa.
	Persamaan	Sama-sama meneliti terkait Efektivitas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
	Perbedaan	Variabel efektivitas

*Sumber: Diolah oleh penulis*

## **2.6 Kerangka Pikir**

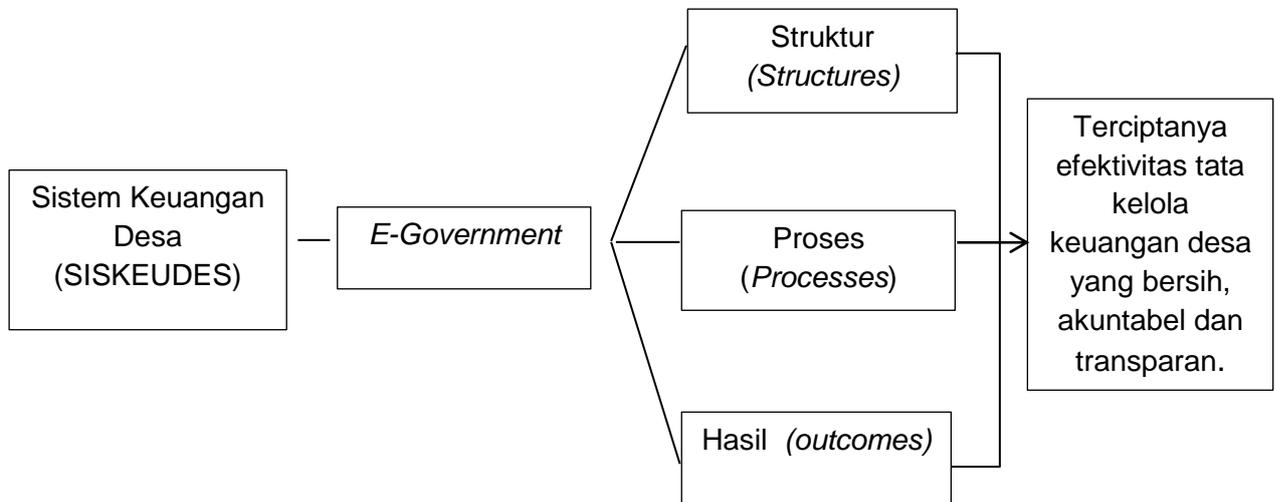
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, melaksanakan pembangunan, dan mengelola keuangan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa berlandaskan pada peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pelaksanaan Nomor 43 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBN), serta beberapa aturan teknis yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. peraturan tersebut digunakan sebagai acuan regulasi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa melalui satu aplikasi yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan salah satu teknologi informasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk diketahui bahwa *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan secara transparansi, bersih, efektif dan efisien. Sehingga, tujuan diciptakannya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan realisasi pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Namun dalam pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) masih menghadapi berbagai masalah yang kompleks sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara efektif salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Menurut Scott (2003) efektivitas dalam sebuah organisasi harus mampu mengidentifikasi kriteria guna untuk mengkonseptualisasikan kinerja organisasi dan layanannya. Sehingga, efektivitas *e-government* sistem keuangan desa akan dilihat dari tiga indikator yaitu: (1) Struktur (*structures*), (2) Proses (*Processes*), dan (3) Hasil (*outcomes*).

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



Sumber: Teori Scott dari Jurnal Laurence E. Lynn, Jr. 2007. *Governance and Organizational Effectiveness: Toward a Theory of Government Performance*. University of Chicago.